

**Daftar Informasi Publik Ppid Pembantu Tahun 2023**  
**Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**

**C. DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

No	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/ Pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Rincian Harga Penyusunan HPS	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b; b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; d. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; e. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;		√	10 tahun

		f. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.			
2.	Rincian Harga Penawaran Penyedia Pemenang Berkontrak	a. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2 dan 3; b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		√	5 tahun
		a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b; b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;			10 tahun

3.	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	<p>d. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <p>e. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;</p> <p>f. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>		√	
4.	Gambar Rencana	<p>a. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p> <p>b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p>		√	Tertutup sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari pemegang cipta.
		<p>a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</p>			

5.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	<p>b. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;</p> <p>c. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>d. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</p> <p>e. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>		√	10 tahun
6.	Addendum Kontrak	<p>a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p>		√	10 tahun

	d. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.		
--	---	--	--

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,  
  
YUSALAT TRIADHI ANDJIOE